

# MEMAHAMI PERILAKU PENGGUNA

Oleh

*Pergola Irianti*

## **Pendahuluan**

Komunikasi antargenerasi sejak tahun 1908 sampai saat ini masih berlangsung dengan baik. Hal ini ditandai dengan masih diingatnya peristiwa satu abad yang lalu, yakni kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional merupakan momen untuk mengenang didirikannya Boedi Oetomo tanggal 20 Mei 1908. Pendirian tersebut dimaksudkan untuk membangkitkan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme bangsa Indonesia untuk melawan penjajah.

Semangat tersebut telah membawa kemajuan bangsa sampai era teknologi informasi ini. Beraneka ragamnya teknologi canggih saat ini telah membawa perubahan pada manusia sebagai individu maupun sebagai kelompok (masyarakat). Kondisi ini berpengaruh pada tuntutan masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya termasuk tuntutan terhadap kondisi perpustakaan. Untuk itu perpustakaan harus melakukan perubahan apabila tidak ingin ditinggalkan penggunanya.

Dengan perubahan tersebut, perpustakaan diharapkan tetap eksis dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat dalam rangka ikut serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, perpustakaan harus menerapkan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan perpustakaan. Pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan akan mampu menangani sebagian besar pekerjaan teknis perpustakaan. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya manusia perpustakaan dalam pekerjaan teknis lambat laun akan berkurang..

### **Perubahan paradigma perpustakaan**

Perubahan paradigma perpustakaan bertujuan untuk mengadaptasi gejala perubahan eksternal dan pemanfaatan peluang. Hal ini menyebabkan perubahan sistem layanan jasa perpustakaan dan informasi jauh lebih luas daripada sekedar layanan pinjam buku, layanan referensi, layanan penelusuran dan lainnya. Menurut Buckland (1988) layanan tersebut berubah dari layanan perpustakaan menjadi layanan informasi. Hal ini berakibat pada derasnya arus kebutuhan terhadap informasi yang baru pula. Oleh karena itu dengan perubahan paradigma perpustakaan itu perpustakaan diharapkan memberikan layanan prima. Yakni bentuk layanan yang berorientasi pada pengguna.

Dikemukakan oleh Mustafa (1998) bahwa pada era teknologi informasi akan membawa perubahan paradigma layanan perpustakaan. Akibat perubahan paradigma tersebut antara lain; 1) prestasi perpustakaan bukan lagi diukur berdasarkan kekayaan koleksi dan jumlah pengunjung ke perpustakaan, melainkan dari jumlah orang yang menggunakan layanan, meskipun mereka tidak datang secara fisik ke perpustakaan; 2) penyediaan fasilitas perpustakaan berteknologi tinggi, harus lebih mengarahkan pustakawan pada penyediaan muatan informasi yang dapat disajikan kepada pengguna.

Dalam hal ini pustakawan harus mengubah sikap dan budaya kerja yang menuntut kerja cepat, tepat, dan efisien.

Berkaitan dengan pelayanan ini, menurut Mustafa (1998), ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh pustakawan agar memiliki citra yang lebih positif. Kompetensi itu antara lain: berorientasi pada kebutuhan pengguna, memiliki kemampuan-kemampuan; berkomunikasi dengan baik, berbahasa asing yang memadai, pengembangan secara teknis dan prosedur kerja, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, dan melaksanakan penelitian bidang perpustakaan.

Pemegang kendali perpustakaan dengan paradigma baru tersebut, sepenuhnya tetap ada pada para pustakawan. Pustakawan sebagai individu memiliki keunikan dalam bertindak atau bertingkah laku. Keunikan tersebut sering tidak disadari oleh pustakawan dalam melaksanakan tugasnya. Terkait dengan masalah kepuasan pengguna terhadap layanan perpustakaan ini pernah dilakukan penelitian. Handayani, dkk. (2004) dalam penelitiannya, menyimpulkan bahwa dari lima dimensi (indikator) kepuasan pengguna terhadap layanan perpustakaan, ada dua dimensi yang tidak sesuai dengan harapan pengguna. Kedua dimensi tersebut adalah ketanggapan dan jaminan yang meliputi: kesediaan pustakawan membantu pengguna menemukan informasi, ketanggapan pustakawan terhadap masalah yang disampaikan oleh pengguna, sikap ramah pustakawan, dan komunikasi pustakawan dengan pemakai. Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan agar pustakawan diberikan pelatihan terkait dengan cara berkomunikasi dan etika layanan.

Penelitian Supriadi, dkk. (2004) menyimpulkan bahwa perhatian pustakawan dalam melayani pengguna perlu lebih ramah dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu disarankan agar pustakawan yang bertugas di bidang layanan perlu ditambah wawasan mengenai konsep layanan yang berorientasi pengguna/*user oriented*

Berbeda dengan kedua penelitian di atas, Widodo (2005) melakukan penelitian mengenai kepuasan petugas perpustakaan yang terkait dengan intensi prososial. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara intensi prososial dengan kepuasan kerja pustakawan, dimana semakin tinggi intensi prososial akan semakin tinggi pula kepuasan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa apabila perilaku prososial pustakawan terhadap pengguna lebih sering dilakukan, maka kepuasan kerjanya meningkat dan kepuasan pengguna menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas ada dua hal penting bagi pustakawan untuk mengubah sikap dan mampu berperilaku sebagai pustakawan profesional, sehingga citra positif menjadi label pustakawan masa kini. Kemampuan berkomunikasi dengan baik, kesediaan membantu menemukan informasi, tanggap terhadap masalah yang disampaikan pengguna, bersikap ramah, memiliki sikap prososial yang tinggi merupakan sebagian dari bentuk-bentuk perilaku yang dapat dilakukan oleh pustakawan dalam berinteraksi dengan pengguna. Pengetahuan perilaku manusia pada umumnya dibahas secara lengkap dalam ilmu Psikologi.

### **Psikologi di perpustakaan**

Pengertian psikologi menurut Crow & Crow (Djamarah, 2002) adalah ilmu yang mempelajari dan berusaha memahami tingkah laku manusia, alasan dan cara mereka melakukan sesuatu, serta memahami bagaimana manusia berpikir dan berperasaan.

Secara umum beberapa definisi psikologi juga dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain Mussen dan Rosenzweig, Woodworth dan Marquis, serta Morgan (Septiyantono, 2003) yang menyimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti dan mengkaji tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan dan interaksi antarmanusia.

Terkait dengan tugas perpustakaan untuk memberikan layanan kepada pengguna, Sugiarto (1999) menjelaskan bahwa dimensi kualitas layanan terdiri atas: (1) tanggung jawab/*responsibility*, yakni tanggung jawab yang mencakup kecepatan dan ketepatan dalam memberikan layanan serta keakuratan dalam memberikan informasi, (2) kepekaan/*responsiveness*, yaitu kepekaan terhadap kebutuhan pengguna yang diiringi dengan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan tersebut, (3) kepastian layanan/*assurance*, yaitu bentuk layanan langsung dalam membantu pengguna, yang didukung dengan pengetahuan dan keterampilan, (4) empati, merupakan kemampuan untuk memahami dan memperhatikan kondisi psikologis pengguna, yang dalam hal ini diperlukan upaya untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna. Diungkapkan pula oleh Sugiarto (1999) bahwa layanan yang baik adalah layanan yang sangat memperhatikan individu sebagai pribadi yang unik dan menarik. Untuk itu layanan yang baik harus disesuaikan dengan konsep pribadi yang meliputi unsur-unsur kepribadian, penampilan, perilaku dan komunikasi, yaitu ramah, sopan dan penuh hormat, yakin, rapi, ceria, senang memaafkan, senang bergaul, senang belajar dari orang lain, senang pada kewajaran dan menyenangkan orang lain.

### **1. Perilaku pengguna**

Pada uraian sebelumnya dikemukakan bahwa layanan perpustakaan pada era teknologi informasi, didominasi oleh media internet. Meskipun demikian penulis yakin bahwa masih ada pengguna yang menyempatkan diri untuk berkunjung secara fisik ke perpustakaan. Dalam kondisi ini pustakawan perlu memiliki pengetahuan yang cukup memadai agar mampu memberikan layanan prima kepada pengguna.

Dalam komunikasi dengan pengguna, pustakawan perlu mempelajari seluk beluk perilaku pengguna sebagai wujud dari seluruh aktivitas jiwa manusia itu sendiri. Agar pustakawan berhasil menganalisis perilaku pengguna, perlu dipikirkan sebelumnya: siapa pengguna dan apa yang menjadi kebutuhan mereka, serta kapan dibutuhkan?

Menurut Mangkunegara (2005), perilaku pengguna adalah tindakan yang dilakukan individu, kelompok, atau organisasi terkait dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan dan menggunakan barang atau jasa yang dibutuhkan yang dapat dipengaruhi lingkungan. Kebutuhan merupakan fundamen yang mendasari perilaku pengguna. Apabila kebutuhannya tidak terpenuhi akan menunjukkan perilaku kecewa. Sebaliknya jika kebutuhannya terpenuhi, pengguna akan memperlihatkan perilaku yang gembira sebagai manifestasi rasa puas.

Dalam memberikan layanan, pustakawan harus mampu mengangkat dan melindungi harga diri pengguna tanpa terhalang oleh penampilan pengguna. Pustakawan perlu menciptakan hubungan baik dan selalu bersikap proaktif, memberikan sambutan lebih dahulu, menawarkan bantuan apa yang dapat dilakukannya, dan mampu memberikan perasaan nyaman pengguna sebelum memperoleh apa yang mereka butuhkan.

Menurut Septiyantono (2003) ada berbagai sifat dan karakter pengguna yang perlu dipahami agar pustakawan dapat menghadapinya dengan baik. Berikut ini beberapa karakter dan cara menghadapi pengguna: (a) pendiam dapat dihadapi dengan penyambutan secara ramah untuk menarik perhatiannya, (b) tidak sabar, dapat mengemukakan bantuan kita secara maksimal dan secepat mungkin, (c) banyak bicara dengan menawarkan bantuan dan mengalihkan perhatian pada hal-hal yang ditawarkan dengan penjelasannya, (d) banyak permintaan, dengarkan dan segera penuhi permintaannya serta minta maaf dan memberi alternatif lain apabila permintaan tidak tersedia, (e) peragu, dengan memberi kepercayaan, tenang, dan tidak memberikan banyak pilihan namun mengikuti seleranya, (f) senang membantah harus dihadapi dengan tenang, dan jangan pernah terpancing untuk berdebat, (g) lugu dihadapi dengan menerima apa adanya, menanyakan keperluannya dan melayani berdasarkan permintaan, (h) siap mental, dihadapi dengan membiarkannya memilih yang dikehendaki, tanpa banyak bertanya, memuji pemakai dan ucapkan terimakasih atas kunjungannya, (i) yang curiga dihadapi dengan memberikan jaminan yang baik dan jangan tunjukkan sikap seolah-olah petugas lebih unggul, (j) yang sombong hadapi dengan tenang, sabar menghadapi sikapnya dan tidak terlalu serius, serta berikan kesan bahwa pengguna tersebut perlu dihormati.

## **2. Perilaku pustakawan**

Sebagai sosok yang memberikan layanan kepada pengguna, pustakawan diharapkan memiliki kepribadian yang baik agar mampu memberikan layanan terbaik. Kepribadian menurut Heldebrand (Septiyantono, 2003) adalah sesuatu hal yang baik atau tidak baik dalam hal kelazimannya dan direspon secara positif atau negatif oleh mereka yang melakukan kontak.

Menurut Stern (Septiyantono, 2003), potensi yang dimiliki oleh seseorang dapat dikembangkan semaksimal mungkin. Demikian halnya dengan pustakawan layanan, diharapkan mampu mengembangkan kepribadiannya secara optimal agar mampu mempengaruhi pengguna untuk selalu menggunakan jasa yang tersedia di perpustakaan.

Menurut Mangkunegara (2005), sebenarnya pustakawan layanan identik dengan pribadi penjual jasa. Berdasarkan falsafah penjual yang dikemukakan Mangkunegara tersebut, yaitu bagaimana menjual dapat memberi kepuasan bagi kedua belah pihak, baik pihak pembeli maupun bagi pihak penjual. Demikian halnya dengan pustakawan layanan, diperlukan upaya layanan yang dapat menimbulkan rasa puas bagi pengguna maupun bagi dirinya sendiri. Selain perhatian terhadap pengguna perlu pula dipikirkan bagaimana menciptakan hubungan baik dan berkelanjutan, dengan demikian pustakawan akan memperoleh minimal dua keuntungan yaitu perpustakaan menjadi terkenal dan citra sebagai pustakawan profesional lebih terangkat.

Septiyantono (2003) juga mengemukakan beberapa hal yang perlu diperhatikan pustakawan dalam memberikan layanan prima, antara lain: (a) mampu berkomunikasi secara verbal maupun non verbal, (b) mampu bekerja secara individual maupun kelompok, (c) mampu berkomunikasi dalam tiga konsep yaitu sikap, perhatian, dan tindakan.

## Penutup

Rendahnya kepuasan pengguna terhadap layanan perpustakaan dapat disebabkan masih rendahnya pengetahuan pustakawan dalam berinteraksi dengan pengguna. Hal ini perlu mendapat perhatian para pengelola perpustakaan. Interaksi yang merupakan salah satu bentuk komunikasi antara pustakawan dan pengguna dengan karakteristik atau pribadi yang berbeda, kadang menimbulkan masalah dalam komunikasi.

Untuk mengatasi keadaan tersebut, perlu kiranya pengelola perpustakaan membekali para pustakawan dengan pelatihan layanan jasa, pelatihan kepribadian dan sebagainya yang intinya lebih meningkatkan kualitas hubungan antarindividu untuk meningkatkan kualitas layanan di perpustakaan.

## Daftar Pustaka

- Buckland, Michael K. 1988. *Library and Services in Theory and Content*, 2<sup>nd</sup> ed. London: Pergamon Press.
- Djamarah, S. B. 2002. *Psikologi Belajar*. Bandung: Rineka Cipta.
- Handayani, R., Keban, Y.T., Ratminto Analisis Kepuasan Pemakai Terhadap Layanan Perpustakaan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Sosiosains*, April, 17 (2) 2004, : 303-317
- Mangkunegara, A.A. A.P. 2005. *Perilaku Konsumen*. Bandung: Refika Aditama.
- Mustafa, B. 1998. Perubahan Paradigma Layanan Perpustakaan Memasuki Era Teknologi Informasi, dalam E. Koswara, dkk., *Dinamika Informasi Dalam Era Global*. Bandung: Pengurus Daerah IPI Jawa Barat dan Remaja Rosdakarya.
- Septiyantono, Tri dkk. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga.
- Sugiarto, E. 1999. *Psikologi Pelayanan Dalam Industri Jasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supriyadi, Eri; Darwin; dan Moelyono. Analisis Kualitas Layanan Perpustakaan Pada UPT Perpustakaan Universitas Jember. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*”, Volume II, (1) 2004, : 22-31.
- Widodo, S.; Moelyono; Isbandiyah.. Hubungan Intensi Prososial Dengan Kepuasan Kerja Pustakawan Universitas Gadjah Mada. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*”, Volume II, (2) 2005: 18-24.

## **ERA KEBANGKITAN KEPUSTAKAWANAN INDONESIA**

**Oleh : Lasa Hs.**

### **Pendahuluan**

Perpustakaan sebagai institusi yang bergerak di bidang pendidikan dan kemasyarakatan selalu berkembang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan tingkat perkembangan kecerdasan masyarakat. Perkembangan ini meliputi aspek manajerial, sumber daya manusia, sistem, sarana prasarana, maupun koleksinya.

Semula perpustakaan dikonotasikan sebuah gedung/ruang sebagai tempat buku dengan segala bentuknya ditunggu petugas yang agak judes. Kini pengertian perpustakaan telah berubah menjadi institusi keilmuan yang dikelola secara profesional. Keberadaan perpustakaan dengan tujuan utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka akan mampu sejajar dengan bangsa lain apabila mampu memanfaatkan perpustakaan dan sumber informasi lain sebagai sumber pendidikan, informasi, penelitian, pelestarian, dan rekreasi kultural. Maka keberadaan perpustakaan yang representatif akan mampu membangkitkan kecerdasan mereka dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan berkehidupan secara individu.

### **Latar Belakang**

Era keterbukaan ini merupakan era yang kondisional kebangkitan kepustakawanan. Hal ini dipengaruhi oleh:

#### **1. Keterbukaan Informasi dan Kemajuan Teknologi.**

Era keterbukaan ini merupakan peluang tiap individu untuk menciptakan informasi, mengakses, mengelola, dan mengembangkannya. Dari sinilah seseorang akan eksis dalam kehidupan intelektual dan kemasyarakatan. Sebab mereka mampu membangkitkan dirinya dan membangunkan kesadaran masyarakat dan bangsanya.

#### **2. Perkembangan Ilmu Perpustakaan**

Sesuai tuntutan dan peningkatan kebutuhan masyarakat, kini di Indonesia terdapat 24 perguruan tinggi negeri/swasta yang membuka jurusan /program studi/minat bidang perpustakaan sejak diploma sampai doktor. Perkembangan pendidikan kepustakawanan ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat pada bidang tersebut. Di samping itu meningkatnya pendidikan kepustakawanan berarti mulai tumbuh kesadaran masyarakat akan sumber belajar yang berupa perpustakaan yang representatif.

#### **3. Perkembangan Profesi Pustakawan**

Memang profesi pustakawan relatif baru di negeri ini. Wajar apabila sebagian masyarakat belum mengenalnya dan belum mengakui eksistensi pustakawan. Pustakawan kini sebagai tenaga kependidikan, fungsional, dan tenaga profesi. Dalam hal ini Pemerintah tengah mengembangkan profesi ini antara lain keluarnya beberapa peraturan dan perundangan tentang perpustakaan dan kepustakawanan misalnya SK Menpan No. 132/2002 yang

saat ini dalam proses revisi karena dianggap kurang mengadopsi perkembangan kegiatan kepustakawanan. Sebagai pedoman pelaksanaan keputusan tersebut kini Perpustakaan Nasional telah menerbitkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 merupakan pedoman kuat dalam pengembangan perpustakaan dan pustakawan di Indonesia. Di samping itu sebagai tindak lanjut dan realisasi undang-undang tersebut, kini sedang disusun standarisasi perpustakaan dan sertifikasi pustakawan.

Beberapa peraturan perundangan lain merupakan peluang pengembangan perpustakaan, ilmu perpustakaan, dan profesi pustakawan. Peraturan dan perundangan itu antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional RI, Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Tunjangan Fungsional Pustakawan, dan lainnya

#### **4. Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan.**

Pemerintah dan masyarakat menyadari pentingnya pendidikan dalam kehidupan berbangsa. Kemajuan bangsa antara lain dapat diukur dari kualitas pendidikannya. Dalam hal ini Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan antara lain perbaikan sarana prasarana, sertifikasi guru, maupun peningkatan anggaran pendidikan menjadi 20 % dari APBN mulai anggaran 2009.

##### **Tujuan**

Kepustakawanan merupakan sumber daya yang mampu menggerakkan bidang lain. Sumber ilmu pengetahuan ini berperan strategis dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan formal dan nonformal. Pengembangan ini dengan tujuan:

##### **1. Mengembangkan Berbagai Bidang**

Dalam usaha mengembangkan berbagai bidang diperlukan ilmu pengetahuan dan informasi terkait. Bahkan cepat atau lambat suatu bidang dipengaruhi oleh perkembangan pengetahuan dalam bidang itu sendiri

##### **2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan**

Dalam berbagai survei dan penelitian ditunjukkan bahwa sumber daya manusia kita menduduki posisi bawah di tingkat dunia bahkan di tingkat ASEAN. Hal ini tentu saja dipengaruhi rendahnya kualitas pendidikan kita. Selama ini pendidikan kita masih berorientasi pada NEM, IP, dan gelar dengan mengabaikan penguasaan ilmu pengetahuan, kreativitas, dan wawasan. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan serius tentang sumber informasi yang bernama perpustakaan.

##### **3. Mengembangkan profesi Pustakawan**

Memang profesi pustakawan relatif baru di negeri ini. Maka wajar apabila sebagian masyarakat belum mengenalnya dan belum mengakui eksistensi pustakawan. Pustakawan kini sebagai profesi, fungsional, dan tenaga kependidikan akan eksis atau tidak tergantung upaya pustakawan itu

sendiri dan lembaga/organisasi terkait. Dalam hal ini Pemerintah melalui Perpustakaan Nasional RI telah dan sedang mengembangkan profesi ini. Bukti-bukti empiris langkah-langkah tersebut antara lain pengakuan pustakawan sebagai fungsional dengan terbitnya SK Menpan berturut-turut Nomor 18 Tahun 1988, Nomor 33 Tahun 1998, dan Nomor 132 Tahun 2002. Kini SK Menpan tersebut dalam proses revisi. Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan merupakan pedoman dan standar yang kuat dalam pengembangan perpustakaan dan pustakawan di Indonesia.

Dalam rangka peningkatan kualitas perpustakaan dan pustakawan, maka kini sedang disusun standarisasi perpustakaan (perguruan tinggi, khusus, sekolah, dan umum) dan sertifikasi pustakawan.

### **Kepustakawanan Dalam Pusaran Sejarah**

Istilah kepeustakawanan secara formal di negeri ini muncul pada SK MENPAN Nomor 33 Tahun 1998 dan SK MENPAN Nomor 132 Tahun 2002. Dalam SK MENPAN Nomor 33 Tahun 1998 kepeustakawanan diartikan sebagai ilmu dan profesi di bidang pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Kemudian dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2008 disebutkan bahwa kepeustakawanan adalah ilmu dan/atau profesi di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi.

Kepustakawanan telah berkembang lama di Amerika antara lain ditemukannya Sistem Klasifikasi Persepuluhan Dewey/*Dewey Decimal Classification/DDC* oleh Melville Louis Kossuth Dewey pada tahun 1876. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 1876 di Philadelphia lahir organisasi kepeustakawanan American Library Association/ALA. ALA merupakan organisasi kepeustakawanan terbesar dan tertua di dunia itu besar pengaruhnya terhadap pengembangan ilmu perpustakaan, perpustakaan, dan profesi pustakawan (Feather and Sturges, 2003 dalam Lasa Hs, 2006).

Sesuai perkembangan intelektual manusia, maka perkembangan perpustakaan semakin luas. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa perpustakaan telah berkembang Sebelum Masehi di Mesir, Persia, dan Cina. Misalnya saja Raja Ashurbanipal (668 – 631 SM) telah membangun perpustakaan dan memiliki koleksi lebih dari 20.000 *clay tablet*. Dalam pengelolaannya tentu saja diperlukan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.

Pengembangan kepeustakawanan semakin menunjukkan eksistensinya antara lain dengan ditemukannya teori katalogisasi oleh Antonio Panizi (Itali) pada tahun 1841 M yang ditulisnya dalam buku *Rules for Compiling of the Catalogue*. Kemudian sistem Klasifikasi Persepuluhan Universal/*Universal Decimal Classification* diciptakan oleh Paul Otlet dan Henri La Fontaine (Belgia) pada tahun 1889.

Pengetahuan tentang perpustakaan dan informasi semakin kokoh dengan ditemukannya *Five Laws of Library Science* oleh Shiyali Ramamrita Ranganathan seorang pustakawan India. Dalam filosofi tersebut, kepeustakawanan bukan sekedar pelayanan informasi, tetapi lebih menekankan kajian-kajian tentang informasi dan aspek-aspeknya. **Prinsip pertama** hukum perpustakaan tersebut adalah *books are for use* dimaksudkan bahwa rekaman ilmu pengetahuan dan informasi itu harus dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal. Sumber-sumber informasi yang tidak dimanfaatkan berarti kemubadziran. Hal ini berarti bahwa semua hal yang mendukung penyebaran dan

pengembangan informasi menjadi tanggung jawab perpustakaan. **Prinsip kedua** *every reader his book*, berarti bahwa tiap pemustaka bahkan setiap individu memiliki hak untuk memperoleh, mengelola, menyebarkan, dan mengembangkan informasi. Oleh karena itu pustakawan harus pandai-pandai mempromosikan informasi kepada masyarakat pada umumnya. Maka disinilah makna bahwa informasi itu menjadi komoditi masyarakat. **Prinsip ketiga** *every book its reader*, berarti bahwa informasi dan ilmu pengetahuan itu untuk semua orang tanpa membedakan ras, suku, agama, maupun aliran politik. Prinsip ini memberikan peluang dalam penyebaran informasi seluas-luasnya. **Prinsip keempat** adalah *save the time of the reader*. Hal ini berarti bahwa siapa yang cepat memperoleh informasi, maka mereka dapat memanfaatkannya/waktu secara efisien dan efektif untuk melakukan aktivitas. Apalagi akses informasi ini didukung teknologi informasi yang akan mempermudah dan mempercepat kegiatan tersebut. **Prinsip kelima** adalah *a library is a growing organism*. Hal ini berarti bahwa sumber informasi selalu tumbuh dan berkembang. Perkembangan ini menuntut adanya layanan informasi yang lebih efektif dan efisien.

Penemuan Shiyali Ramamrita Ranganathan ini mendorong adanya kajian-kajian kepustakawanan dan dari sinilah lahir teori *conspectus*, bibliometrika, *sciencometrics*, dan informatika. Kemudian kajian utama informatika ini meliputi hukum bibliometrika klasik, analisis sitasi dan *co-citation*, indikator ilmiah/*scientific indicators*, pertumbuhan dan perhatian pertumbuhan/*abscelescence* dan penggunaan sumber daya (Walfrom, 2000 dalam Pendit, 2003: 21-22).

### Indonesia

Kepustakawanan di Indonesia telah dimulai sejak lama dan diduga sejak tahun 400 an saat lingga berupa batu dengan tulisan Palawa ditemukan dari periode Kutai. Lingga tersebut berisi tulisan tentang raja Kutai (Sulistya-Basuki, 1994: 7). Ini kalau digunakan teori bahwa kepustakawanan adalah ilmu dan profesi di bidang pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Hal ini juga diperkuat keterangan Fa-Hsien seorang musafir yang menyatakan bahwa di kerajaan Ye-po-ti (Tarumanegara) dijumpai kaum Brahmana yang dalam mengajarkan agama tentunya berdasarkan buku-buku keagamaan.

Kehadiran orang-orang Inggris, Perancis, dan Denmark ke Indonesia tidak memengaruhi kepustakawanan. Mereka ke nusantara ini semata-mata untuk melakukan kegiatan bisnis.

Embrio perpustakaan di Indonesia diduga sudah muncul pada masa kejayaan Majapahit. Saat itu para pujangga telah menulis karya sastra di atas daun lontar, bambu, kulit kayu, atau kulit bambu. Tulisan-tulisan itu berisi doa, mantera, silsilah raja, pelipur lara, dan ajaran kepercayaan yang disimpan di istana raja sebagai koleksi kerajaan.

Mulai tahun 1.000 an sastra Jawa semakin berkembang dan muncullah karya sastra agung oleh para pujangga kraton. Karya sastra yang terkenal saat itu antara lain Arjuna Wiwaha karya Mpu Kanwa, Bharata Yudha karya Mpu Sedah dan Mpu Panuluh. Kemudian pada abad XIV Mpu Tantular termasyhur dengan karya sastranya (Nurhadi, 1983: 32)

Sementara itu menurut catatan Sulistya-Basuki (1994: 10) bahwa Belanda pada tahun 1624 merencanakan untuk mendirikan perpustakaan gereja di Batavia (sekarang Jakarta). Namun karena berbagai pertimbangan dan kesulitan, baru pada tanggal 27 April 1643 perpustakaan itu berdiri. Lebih satu abad kemudian berdirilah perpustakaan khusus

di Batavia pada tanggal 24 April 1778 dengan nama *Bataviasche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*. Perpustakaan ini kemudian mengeluarkan katalog buku pertama di Indonesia pada tahun 1846 dengan judul *Bibliotecae artiumcientiaerumquae Batavia Floret Catalogue Systematicus* hasil suntingan P. Bleeker. Lembaga tersebut dalam perjalanannya berganti nama menjadi Koninklijk Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen yang pada tahun 1950 lembaga ini menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Lembaga ini pada tahun 1962 diserahkan kepada Pemerintah Indonesia dan berubah nama menjadi Museum Pusat dan saat itu juga telah memiliki beberapa koleksi. Koleksi ini lalu dikenal dengan Perpustakaan Museum Nasional. Dalam perjalanannya kemudian pada tahun 1980 Perpustakaan Museum Nasional ini dilebur ke Pusat Pembinaan Perpustakaan yang pada tahun 1989 dilebur lagi menjadi bagian dari Perpustakaan Nasional RI.

Untuk memperkuat kedudukannya di Indonesia, Belanda mendirikan beberapa lembaga dan balai di beberapa kota antara lain Lembaga Meteorologi dan Geofisika (1866), Landsarchief (Arsip Nasional) (1892), Biro Pusat Statistik (1925) di Batavia. Kemudian di Bogor berdiri Lembaga Kepustakaan Bibliotheca Bogoriensis (1842), Lembaga Penyakit Hewan (1908), Balai Penyelidikan Pertanian (1918). Kemudian di Bandung didirikan Perpustakaan Negara Pasteur (1890), Balai Hidrologi dan Hidrometri (1914), dan Observatorium Boscha (1920) yang kemudian menjadi Lembaga Astronomi Lembang. Pendirian lembaga-lembaga tersebut juga diikuti pendirian perpustakaan masing-masing yang merupakan awal perkembangan perpustakaan khusus di Indonesia,

#### **Organisasi Kepustakawanan**

Dalam pengembangan profesi diperlukan organisasi profesi. Organisasi ini sebagai media penyaluran aspirasi anggota, menyejahterakan anggota, melindungi anggota, dan menjaga kualitas layanan profesi. Organisasi kepustakawanan di Indonesia menurut beberapa catatan didirikan pertama kali pada tahun 1912 di Batavia (sekarang Jakarta) atas saran Dr. H.J. van Lummel. Beliau adalah seorang guru di HBS Koning Wilhelm di Batavia. Kemudian pada tahun 1916 terbentuklah organisasi *Vereniging tot Bevordering van het Bibliothekwzenen* (Perkumpulan Untuk Memajukan Ilmu Perpustakaan) yang bertujuan: 1) mendorong berdirinya perpustakaan baru dan membantu perpustakaan rakyat yang telah ada; 2) memajukan usaha sentralisasi perpustakaan; 3) mengusahakan peminjaman antarperpustakaan di Hindia Belanda (Indonesia); 4) memajukan lalu lintas pertukaran dan peminjaman bahan pustaka di dunia internasional; 5) mengumpulkan dan memajukan sumber referensi dan tugas rujukan; 6) mendirikan biro penerangan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dokumentasi; 7) mendirikan gedung untuk perpustakaan umum; 8) usaha lain untuk tercapainya tujuan tersebut.

Keanggotaan organisasi ini semula terbatas di Batavia lalu menyebar ke Medan, Surabaya, Tegal, Semarang, Bogor, Bandung, Bondowoso, dan Salatiga. Saat itu tercatat 62 orang anggota dan terbanyak dari perpustakaan khusus. Sampai dengan tahun 1920, organisasi ini tak terdengar kegiatannya dan sejak itu pula sampai pendudukan Jepang praktis tidak ada organisasi kepustakawanan.

Sejak Indonesia merdeka mulai tumbuh kesadaran untuk mendirikan perpustakaan dan perlunya wadah untuk mengembangkan ilmu perpustakaan dan mengembangkan kerjasama antarperpustakaan. Maka pada tahun 1949 berdirilah organisasi kepustakawanan *Vereniging van Bibliotheca Resen van Indonesie* di Jakarta dengan

tujuan untuk mengembangkan ilmu perpustakaan dan kerjasama antarperpustakaan. Kegiatan ini berhenti menjelang tahun 1950. Kemudian pada tahun 1953 di Jakarta berdiri Asosiasi Perpustakaan Indonesia/API, yakni perkumpulan ahli perpustakaan di Yogyakarta dan Bogor dan masih bersifat lokal. Atas anjuran Depdikbud saat itu berlangsung Konferensi Perpustakaan Seluruh Indonesia tanggal 25 – 27 Maret 1954 di Jakarta. Beberapa keputusan konferensi ini antara lain: 1) mendorong berdirinya Perkumpulan Ahli Perpustakaan Seluruh Indonesia/PAPSI; 2) perlu adanya pendidikan ahli perpustakaan; 3) perlu adanya Dewan Perpustakaan Nasional ; 4) mendirikan perpustakaan umum; 5) kerjasama antarperpustakaan di Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi Asosiasi Perpustakaan Indonesia/API bergabung dengan Perkumpulan Ahli Perpustakaan Seluruh Indonesia/PAPSI. Kemudian pada Kongres PAPI bulan April 1956 diputuskan untuk diperluas dan nama organisasi ini menjadi Perhimpunan Ahli Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi/PAPADI. Kongres PAPADI pertama berlangsung di Jakarta pada tanggal 19 – 22 Oktober 1957. Kemudian pada pertemuan antar anggota di Jakarta pada tanggal 12 Juli 1962 dan organisasi ini berubah menjadi Asosiasi Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi/APADI. Sementara itu pada tanggal 5 Desember 1969 di Jakarta terbentuk Himpunan Pustakawan Khusus Indonesia/HPCI dengan tujuan: 1) membina perkembangan perpustakaan khusus di Indonesia; 2) memupuk hubungan antar anggota.

Kesadaran perlunya organisasi kepastakawanan yang kuat semakin meningkat, maka muncul pemikiran adanya penyatuan beberapa organisasi kepastakawanan yang telah ada. Kemudian terjadilah pertemuan pada tanggal 21 Januari 1973 yang diikuti oleh pengurus APADI Pusat, APADI Cabang Jakarta, Bogor, Bandung, HPCI, dan Himpunan Pustakawan DIY di Bandung. Dalam pertemuan itu disepakati akan menggelar Kongres Pustakawan Se Indonesia pada tanggal 5 – 7 Juli 1973 di Ciawi Bogor. Dari kongres itulah lahir Ikatan Pustakawan Indonesia/IPI dan Drs. Sukarman K. terpilih sebagai ketua, Drs. J.P. Rompas sebagai sekretaris, dan Ny. Yayah Wartomo, SH sebagai bendahara. IPI sebagai organisasi profesi bertujuan: 1) menghimpun, menampung, dan menyalurkan aspirasi mereka yang berprofesi dalam ilmu perpustakaan dan ilmu pengetahuan lainnya yang berkaitan dan atau bekerja dalam bermacam-macam jenis perpustakaan atau badan-badan lain yang ruang lingkupnya berkaitan dengan perpustakaan; 2) mengusahakan mereka yang termasuk dalam pasal 5 ayat 1 Anggaran Dasar ini pada tempat yang semestinya di dalam masyarakat; 3) meningkatkan, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu perpustakaan demi kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kesejahteraan masyarakat; 4) menempatkan ilmu pengetahuan lainnya yang berkaitan pada tempat yang semestinya di antara ilmu-ilmu pengetahuan.

Ikatan Pustakawan Indonesia telah berusaha meningkatkan kualitas pustakawan di negeri ini melalui berbagai seminar, pelatihan, kunjungan, dan penerbitan. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh IPI antara lain adanya dikotomi pustakawan negeri dan pustakawan swasta, seleksi anggota, akreditasi pendidikan kepastakawanan, dan peningkatan kualitas pustakawan.

Memang diakui bahwa semula Ikatan Pustakawan Indonesia menjadi wadah bagi seluruh pustakawan Indonesia. Organisasi ini telah melakukan berbagai usaha dan kegiatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama dengan tugas dari lembaga tempat dimana pustakawan bekerja. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan IPI selama ini antara lain: 1) upaya penambahan jumlah perpustakaan; 2) memperjuangkan

profesi pustakawan sebagai tenaga fungsional; 3) mempromosikan perpustakaan di kalangan masyarakat dan pemerintahan; 4) melakukan kerjasama dengan organisasi terkait dengan profesi pustakawan; 5) memberikan pembinaan terhadap anggota dengan berbagai kegiatan ilmiah; 6) memberikan pembinaan terhadap lembaga pendidikan pustakawan; 7) berperan aktif untuk melahirkan berbagai pedoman dan standar perpustakaan; 8) berperan aktif dalam penyusunan Undang-Undang Perpustakaan; dan 9) aktif dalam berbagai kegiatan nasional, regional, dan internasional dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi (Zulfikar Zen, 2006).

Era reformasi yang puncaknya terjadi pada tanggal 21 Mei 1998 membawa perubahan besar. Kekuasaan yang dulu cenderung sentralistik dan militerisme berubah menjadi pemerintahan desentralistik dan dunia demokrasi mulai terbuka. Kebebasan pers dan kebebasan mendirikan partai politik terbuka luas, sehingga pada Pemilu 2009 nanti terdapat 38 partai yang siap berlaga. Hal ini juga berpengaruh pada aspek kehidupan individu, masyarakat, dan profesi. Dari iklim inilah lalu lahir beberapa organisasi kepustakawanan antara lain Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia/FPPTI (12 Oktober 2000) di Ciawi Bogor, Forum Perpustakaan Khusus Indonesia/FPKI (18 Nopember 2000), Forum Perpustakaan Umum Indonesia/FPUI (4 Juni 2002) di Cipayung Bogor, Forum Perpustakaan Sekolah Indonesia/FPSP (8 Agustus 2002) di Cisarua Bogor, Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia/ISIPII (23 Maret 2006), dan Himpunan Pengelola Perpustakaan Sekolah Muhammadiyah/HIMPUSMA (26 Mei 2007) di kota Yogyakarta yang didirikan oleh Lasa Hs dan kawan-kawan.

### **Pendidikan Kepustakawanan**

Pendidikan kepustakawanan di Indonesia semula berupa kursus yakni Kursus Pendidikan Pegawai Perpustakaan (20 Oktober 1952 – 1955) yang diikuti oleh para lulusan SLTA. Kursus yang berlangsung dua tahun itu untuk memenuhi kebutuhan akan ahli-ahli perpustakaan pada semua jenis perpustakaan, sejak perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum, sampai pada perpustakaan instansi/khusus. Kursus ini pertama kali dimulai tanggal 20 Oktober 1952 berdasarkan SK Menteri PPK tanggal 8 September 1952 Nomor : 30418/Keb. Kemudian pada tahun 1955 kursus ini disempurnakan menjadi dua setengah tahun dengan pengakuan lulusannya sama dengan lulusan sarjana muda (golongan E II) dan nama kursus itu diubah menjadi Kursus Pendidikan Ahli Perpustakaan di bawah pengawasan Biro Perpustakaan. Pada tahun 1959 muncul pemikiran untuk meningkatkan kursus ini menjadi Akademi Perpustakaan. Setelah didiskusikan akhirnya kursus ini menjadi Sekolah Perpustakaan sebagai terjemahan Library School di luar negeri yang masa studinya menjadi 3 tahun setelah SLTA. Setelah kursus dan sekolah perpustakaan itu berjalan sekitar 9 tahun, maka timbul pemikiran untuk lebih ditingkatkan lagi, lalu bidang perpustakaan dijadikan salah satu jurusan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya sejak tanggal 7 Oktober 1963 secara administratif Jurusan Ilmu Perpustakaan ini dipindahkan dari FKIP IKIP (saat itu) ke Fakultas Sastra (kini FIB) UI sampai sekarang. Bidang perpustakaan semakin berkembang lalu di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta membuka program studi, jurusan, maupun minat bidang perpustakaan baik jalur profesional maupun jalur akademik. Adapun perguruan tinggi yang menyelenggarakan jalur profesional antara lain:

No.	Perguruan Tinggi	Program
1.	Universitas Gadjah Mada	D 3

2. Universitas Indonesia	D 3
3. UIN Sunan Kalijaga	D 3
4. Universitas Diponegoro	D 3
5. Universitas Negeri Sebelas Maret/UNS	D 3
6. Institut Pertanian Bogor	D 3
7. Universitas Airlangga	D 3
8. Universitas Hasanuddin	D 3
9. Universitas Bengkulu	D 3
10. Universitas Lampung	D 3
11. Universitas YARSI	D 3
12. Universitas Sumatera Utara	D 3
13. Universitas Lancang Kuning	D 3
14. Universitas Sam Ratulangi	D 3
15. Universitas Terbuka	D 3
16. IAIN Imam Bonjol	D 3
17. IAIN Ar Raniry Aceh	D 3
18. Universitas Muhammadiyah Makasar	D 3

Adapun beberapa perguruan tinggi yang menyelenggarakan jurusan, program studi, maupun minat bidang perpustakaan jalur akademik antara lain:

No.	Perguruan Tinggi	Jurusan/program studi/minat
1.	Universitas Gadjah Mada	S 2
2.	UIN Sunan Kalijaga	S 1
3.	Universitas Negeri Yogyakarta	S 3
4.	Universitas Indonesia	S 1, S 2
5.	Universitas Padjadjaran	S 1, S 2
6.	Universitas YARSI	S 1
7.	Universitas Diponegoro	S 1
8.	Universitas Wijayakusuma	S 1
9.	UIN Syarif Hidayatullah	S 1
10.	Universitas Pendidikan Indonesia	S 1
11.	Universitas Hasanudin	S 1
12.	Universitas Sumatera Utara	S 1
13.	Universitas Islam Nusantara	S 1

Banyaknya lulusan pustakawan perguruan tinggi ternyata belum mampu memengaruhi jumlah pustakawan (PNS) bila dibanding dengan tenaga perpustakaan yang lulusan non perpustakaan. Berdasarkan pendidikan formal perpustakaan dan non perpustakaan per 18 Juli 2008 adalah sebagai berikut:

No.	Pendidikan	Bidang Perpustakaan	Bidang Non Perpustakaan	Jumlah
1.	SLTA	-	849	849
2.	D1	-	15	15
3.	D2	369	22	391
4.	D3	274	38	312
5.	SM	6	133	139

6.	S1	435	671	1106
7.	S2	103	57	160
	Jumlah	1187	1785	2.972

Sumber : Kartini, 2008: 4

Melalui pengembangan pendidikan kepustakawanan tersebut dan berbagai pelatihan, diharapkan mampu menciptakan pustakawan yang profesional, mandiri, kreatif, berwawasan ke depan, percaya diri, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepustakawanan perlu memperhatikan pilar-pilar pendidikan yakni belajar mengetahui/*learning to know*, belajar melakukan/*learning to do*, belajar hidup dalam kebersamaan/*learning to live together*, dan belajar menjadi diri sendiri/*learning to be*.

Berangkat dari pemikiran ini perlu peninjauan ulang akan kurikulum pendidikan kepustakawanan. Di era yang kompetitif ini perlu penekanan pada penguasaan teknologi informasi, profesionalisme, kewirausahaan, manajemen, pengembangan diri, dan manajemen ilmu pengetahuan.

Kinerja pustakawan pada umumnya kurang profesional dan masih berorientasi pada rutinitas dan birokrasi. Meskipun secara formal kita telah memiliki 1106 pustakawan lulusan S1 dan 160 orang lulusan S 2 baik pustakawan maupun non pustakawan ternyata belum mampu mengembangkan prosedur, teori, dan pemikiran kepustakawanan yang signifikan.

#### **Faktor-Faktor Kebangkitan**

Dalam pengembangan kepustakawanan terdapat peluang dan kondisi pendukung antara lain peraturan perundangan, anggaran pendidikan 20 % dari APBN, perkembangan pendidikan kepustakawanan, upaya sosialisasi kepustakawanan, peran organisasi profesi, dan era keterbukaan.

##### **- 1. Perangkat Peraturan/Perundangan, dan Kebijakan**

Dalam usaha pengembangan kepustakawanan sebenarnya tersedia seperangkat peraturan perundangan sebagai unsur pendukung. Peraturan dan perundangan yang terkait dengan kepustakawanan dalam arti luas telah memberikan peluang pengembangan bidang tersebut. Beberapa peraturan dan perundangan itu antara lain:

##### **a. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional**

Kedudukan Perpustakaan Nasional merupakan kedudukan yang strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang maju dapat dilihat dari peradaban, budaya, kemajuan berpikir, dan perilaku bangsa itu sendiri. Kemudian tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat ditengarai dari kondisi perpustakaan sebagai lembaga penyimpan hasil budaya dan peradaban dari waktu ke waktu.

Perpustakaan merupakan salah satu sarana pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya dan mempunyai fungsi sebagai sumber informasi, sumber ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.

Kedudukan dan fungsi Perpustakaan Nasional sebagai lembaga non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden merupakan suatu keuntungan. Dengan kedudukan ini Perpustakaan Nasional mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan

perpustakaan dalam rangka pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya dan pelayanan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.

Dengan tugas pokok tersebut Perpustakaan Nasional memiliki wewenang dan tanggung jawab besar terhadap pengembangan semua jenis perpustakaan dan tenaga perpustakaan sebagai penggerak sumber daya perpustakaan yang lain. Dengan adanya perpustakaan yang representatif diharapkan mampu memberikan fasilitas akses informasi bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab kemajuan suatu bangsa antara lain dapat diukur dari kualitas dan kuantitas karya tulis, karya cetak, dan karya rekam sebagai media penyimpan hasil pemikiran, peradaban, dan budaya suatu bangsa.

Di sinilah letak peran Perpustakaan Nasional RI yang tertuang dalam Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1989 sebagai aset nasional yang menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, menambah wawasan, meningkatkan ketrampilan untuk mencapai kehidupan yang berkualitas rohaniah dan jasmaniah.

Keberadaan Perpustakaan Nasional sebagai pelaksana tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan dan berkedudukan di ibu kota negara itu merupakan posisi strategis dalam kebangkitan dunia kepastakawanan. Sebab dengan kedudukan itu Perpustakaan Nasional memiliki tugas-tugas:

- a. Menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan;
- b. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan
- c. Membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan
- d. Mengembangkan standar nasional perpustakaan

Dengan demikian, Perpustakaan Nasional memiliki tanggung jawab untuk:

- a. mengembangkan koleksi nasional;
- b. melestarikan hasil budaya bangsa;
- c. memasyarakatkan perpustakaan;
- d. mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar negeri (UU No.43 Tahun 2007)

Apabila diperhatikan *point-point* tugas Perpustakaan Nasional tersebut memang cukup berat dalam pengembangan sistem perpustakaan dan kepastakawanan secara nasional terutama dalam rangka pembangunan nasional.

Dalam pembangunan bangsa tidak lepas dari pengembangan ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi. Di sinilah peran Perpustakaan Nasional dan perpustakaan lain dalam pengelolaan sumber ilmu, informasi, dan teknologi. Sebab kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pengembangan intelektual dan artistik bangsa itu sendiri.

#### **b.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak & Karya Rekam**

Dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya antara lain diperlukan adanya usaha pelestarian dan pemanfaatan hasil karya intelektual maupun karya artistik anak bangsa. Kekayaan itu merupakan manifestasi dan ekspresi cipta, rasa, dan karya manusia Indonesia. Khazanah keilmuan ini merupakan faktor penting dalam menunjang pembangunan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan penyebaran informasi.

Sehubungan dengan tujuan itulah, maka disusun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Penyusunan ini dalam rangka usaha menghimpun, melestarikan, dan mewujudkan koleksi karya cetak dan karya rekam secara nasional. Karya cetak dan karya rekam tersebut pada hakekatnya berisi pemikiran, informasi, ilmu pengetahuan, ajaran, nilai, dan hasil penelitian yang perlu diwariskan, disebarluaskan, dan dikembangkan lebih jauh. Hal ini untuk menjaga agar dalam perkembangan suatu bangsa tidak tercabut akar-akar budaya. Disinilah perlunya pelestarian oleh lembaga negara sebagai kekayaan intelektual bangsa.

Undang-undang tersebut merupakan upaya agar karya rekam, karya tulis, dan karya cetak itu terkumpul menjadi koleksi nasional. Yakni semua karya tulis, karya cetak, dan karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Koleksi nasional ini akan terwujud apabila semua penerbit, perusahaan rekaman, dan perorangan berkesadaran untuk menyerahkan produk mereka ke Perpustakaan Nasional maupun Badan Perpustakaan setempat. Disamping itu apabila masyarakat terinspirasi oleh undang-undang ini, maka mereka akan menyerahkan karya intelektual dan artistik ke perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, atau perpustakaan umum di mana mereka menjadi anggota potensial. Sebab keberadaan perpustakaan di suatu lembaga dan masyarakat sebenarnya merupakan lembaga deposit bagi masyarakat yang bersangkutan.

Sesuai perubahan politik yang mengarah pada desentralisasi kekuasaan dan otonomi daerah, maka Pemerintah Provinsi DIY mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan ini dimungkinkan dilaksanakan oleh provinsi lain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952). Dalam Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa setiap Penerbit dan Pengusaha Rekaman wajib menyerahkan hasil karya cetak atau karya rekam kepada Badan Perpustakaan (Pasal 3). Kewajiban ini merupakan upaya pendokumentasian karya intelektual dan karya artistik masyarakat setempat, pelestarian, dan pengembangannya. Sebab karya-karya tersebut merupakan salah satu karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa, dan karsa. Hasil karya manusia ini sangat penting dalam menunjang pembangunan pada umumnya dan terutama pembangunan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, informasi, dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.

### **c.SK MENPAN No. 132 Tahun 2002**

Jabatan pustakawan diakui secara resmi sebagai jabatan fungsional pertama kali dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pustakawan. Setelah peraturan tersebut berjalan selama sepuluh tahun, maka dilakukan revisi dan terbitlah Surat Keputusan MENPAN Nomor 33 Tahun 1998. Mengingat perkembangan fungsional begitu cepat, lalu Pemerintah menata jabatan-jabatan fungsional yang

mulai tumbuh di negara kita. Lalu untuk pengembangan jabatan fungsional diterbitkan Surat Keputusan MENPAN Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya

Untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Keputusan MENPAN tersebut diperlukan petunjuk teknis yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pustakawan tim penilai, dan pejabat terkait. Maka Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga pembina perpustakaan dan pustakawan seluruh Indonesia menerbitkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Dengan petunjuk teknis ini diharapkan mampu menyamakan persepsi di antara pihak-pihak yang terkait sehingga pelaksanaan pengembangannya dapat optimal.

Petunjuk teknis tersebut ternyata masih menimbulkan berbagai persepsi dan mengalami berbagai kendala dalam penerapannya. Dengan berbagai pertimbangan dan realita di lapangan, maka Perpustakaan Nasional RI menerbitkan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 2 April 2008.

Dalam Petunjuk Teknis yang terakhir ini diberikan penjelasan, contoh-contoh kasus, dan lampiran-lampiran yang memudahkan pemahaman. Dengan demikian perbedaan penafsiran antara pihak-pihak terkait dapat diperkecil.

Apabila pustakawan mampu memahami peraturan dan perundangan tersebut secara cerdas, maka mereka akan mampu mencapai karir puncak. Namun disayangkan sebagian besar pustakawan kita kurang bisa menangkap peluang tersebut dan selalu saja berharap kenaikan tunjangan fungsional tanpa menghasilkan produk intelektual sebagai ciri khas seorang profesional.

Seharusnya mereka mampu melahirkan gagasan, ide, dan pemikiran dalam pengembangan ilmu perpustakaan, perpustakaan, dan profesi pustakawan. Peluang itu tidak mungkin diperoleh oleh para pegawai administrasi pada umumnya. Seorang pustakawan berkesempatan luas untuk mengembangkan diri melalui kegiatan mengajar di SLTA, memberi kuliah di perguruan tinggi, memberikan bimbingan, melakukan penelitian, menjadi narasumber pertemuan ilmiah, menjadi konsultan, maupun menjadi penulis. Kegiatan-kegiatan ini sebenarnya merupakan kegiatan kemandirian yang merupakan ciri profesional. Karena rendahnya pemahaman tentang hakekat profesi, maka kinerja dan pola pikir para pustakawan belum menampakkan kemandirian.

Di satu sisi, pustakawan sebagai sumber daya yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan dan informasi seharusnya mampu menggerakkan sumberdaya manusia dan fungsional lain. Sebab dalam pengembangan semua bidang diperlukan ilmu pengetahuan dan informasi.

#### **d.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan**

Rancangan undang-undang perpustakaan telah lama disiapkan dan baru tahun 2007 berhasil disetujui Dewan Perwakilan RI sebagai undang-undang meskipun harus melewati berbagai proses. Undang-Undang yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 129 Tahun 2007 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774 tanggal 1 Nopember 2007 itu merupakan landasan yang kuat dalam penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan, ilmu perpustakaan, dan profesi pustakawan. Hal ini merupakan secercah harapan adanya kebangkitan kepustakawanan di Indonesia.

Perkembangan kepustakawanan tidak lepas dari perkembangan ilmu perpustakaan. Ilmu perpustakaan merupakan kajian dan pendekatan proses pengumpulan, pengelolaan, pelestarian, dan pemberdayaan sumber-sumber informasi. Sebagai suatu ilmu, dalam kajian-kajian ini ilmu perpustakaan mengadopsi teori-teori maupun konsep dari bidang lain seperti statistik, psikologi, manajemen, komputer, matematika, bisnis, dan lainnya. Dari interaksi ini lahirlah ilmu baru seperti statistik perpustakaan, teknologi informasi perpustakaan, psikologi perpustakaan, dan lainnya. Dengan adanya interaksi yang semakin intensif, maka akan semakin banyak dilahirkan konsep dan teori baru.

Undang-undang yang menelan biaya milyaran rupiah itu juga akan mengangkat eksistensi perpustakaan pada umumnya. Kalau dulu perpustakaan dimaknai sebagai gedung/ruang untuk tempat penyimpanan koleksi, maka kini pengertian perpustakaan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kini perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka (Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 Bab I Pasal 1 ayat 1).

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa perpustakaan sebagai lembaga ilmu pengetahuan harus dikelola oleh tenaga profesional dengan standar tertentu, mengelola sumber ilmu pengetahuan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi masyarakat. Melalui sumber informasi, fasilitas, dan sarana prasarana yang dikelola perpustakaan, masyarakat dapat meningkatkan kualitas diri. Dalam hal ini masyarakat dapat melakukan proses belajar sepanjang hayat/*long life learning* dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penyelenggaraan perpustakaan ke depan tidak asal ada. Penyelenggaraan perpustakaan harus dikelola secara profesional dan dalam penyelenggaraannya harus berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.

Pustakawan sebagai sumber daya yang menggerakkan perpustakaan itu bukan sembarang orang yang bekerja di perpustakaan tanpa memiliki ilmu pengetahuan dan kompetensi yang memadai. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki pendidikan dan kompetensi dalam bidangnya yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Dengan pernyataan yang tegas ini dapat dipahami bahwa pustakawan adalah seorang ilmuwan karena memiliki ilmu pengetahuan tentang kepustakawanan dan berkewajiban untuk menyumbangkannya melalui media cetak, tatap muka (mengajar, menyuluh, menyampaikan makalah dalam temu ilmiah), atau media cetak (buku, surat kabar, majalah, jurnal dll) maupun melakukan penelitian (SK MENPAN No. 132/2007).

Dari kesempatan ini seorang pustakawan memiliki peluang besar untuk berprestasi di bidang kepustakawanan sehingga dapat mencapai karir puncak yakni Pustakawan Utama. Hal ini merupakan bentuk penghargaan formal terhadap pustakawan sebagai tenaga profesional dan ilmuwan sama dengan guru, dosen, dokter, peneliti, hakim, dan lainnya.

Lahirnya undang-undang tersebut merupakan titik awal/*starting point* kebangkitan (angin segar) dan merupakan landasan hukum yang kokoh sebagai

keberadaan, pelaksanaan, dan pengembangan perpustakaan pada umumnya. Perpustakaan sebagai salah satu sumber informasi memiliki akses strategis dalam mendukung keberhasilan pendidikan dan pembelajaran masyarakat secara formal, informal, maupun nonformal. Dalam hal ini perpustakaan memiliki peran dan fungsi untuk mewujudkan keberhasilan pendidikan sekaligus sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

#### - **2. Anggaran Pendidikan 20 % APBN**

Sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi, akhirnya Pemerintah memenuhi anggaran pendidikan tahun 2009 menjadi 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN. Terlepas dari kepentingan politik, langkah ini merupakan iktikad baik dan tanggung jawab Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan. Pendidikan merupakan kunci kemajuan dan kecerdasan bangsa yang harus dipikirkan bersama. Kemajuan bangsa memang terletak pada kualitas pendidikannya. Dari sinilah, maka disusun berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Maka ditetapkan visi pendidikan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani dan masyarakat Indonesia baru. Masyarakat Indonesia baru tersebut adalah masyarakat yang memiliki sikap dan wawasan keimanan dan akhlak tinggi, kemerdekaan dan demokrasi, toleransi dan menjunjung hak azasi manusia, saling pengertian, dan berwawasan global (Mulyasa, 2003: 19)

Pemenuhan anggaran 20 % dari APBN itu tentunya untuk meningkatkan sarana fisik dan non fisik penunjang kegiatan belajar mengajar antara lain berupa perpustakaan sekolah. Sesuai Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa setiap sekolah/madrasah harus memiliki perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan tetap harus memperhatikan standar nasional pendidikan.

Kemudian untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka perpustakaan sekolah wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik. Dengan penyediaan koleksi yang memadai ini, diharapkan mampu menambah wawasan siswa dan guru sebagai pendidik. Guru yang kurang wawasannya berakibat tidak mampu berpikir ilmiah apalagi dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah.

Sungguh mengesankan dunia pendidikan kita apabila para guru tidak mampu menulis karya ilmiah. Kalau demikian bagaimana akan diperoleh lulusan yang berkualitas karena pendidiknya pun tidak memiliki wawasan yang luas.

Guru diangkat sebagai tenaga fungsional berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 084/1993. Fungsionalisasi guru ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan sekaligus kesejahteraan guru. Dalam hal ini guru diberi kesempatan untuk berprestasi antara lain dengan indikator angka kredit. Dengan angka kredit yang dapat dicapai, maka setiap guru berpeluang untuk mencapai puncak karir yakni guru utama yang sejajar dengan fungsional lain yakni guru besar, pustakawan utama, dokter utama, peneliti utama, dan lainnya.

Namun demikian, kesempatan itu ternyata kurang dimanfaatkan. Sebab dengan pandainya mengemukakan berbagai alasan, sebagian besar guru tidak mampu memenuhi angka kredit dari unsur pengembangan profesi. Tanpa adanya unsur nilai pengembangan profesi ini, maka seorang guru cukup *pasrah bongkokan* pada

golongan IV/a. Sebab untuk naik jabatan/pangkat/golongan IV/b harus membuat karya tulis ilmiah.

*Booming* guru pada golongan IV/a terjadi di berbagai daerah, dan salah satu contoh terjadi di Kabupaten Kulonprogo. Data stagnasi atau kemandegan kenaikan pangkat guru yang menduduki golongan IV/a di Kabupaten Kulonprogo saat ini mencapai 2.837 dari sekitar 7.000 guru yang tersebar di semua jenjang sekolah atau hampir mendekati separuh jumlah guru (Kedaulatan Rakyat, 11 Juli 2008)

### **3.Perkembangan Pendidikan Kepustakawanan**

Kepustakawanan sebagai ilmu dan profesi di bidang pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Dengan demikian mereka yang bergerak dalam profesi kepustakawanan ini harus memiliki ilmu pengetahuan dan kompetensi. Kompeten dalam hal ini berarti bahwa seorang pustakawan harus memiliki dan menerapkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap untuk bekerja sesuai standar yang diharapkan di tempat kerja. Dengan demikian, seorang pustakawan dituntut untuk menguasai dan mampu menerapkan ketrampilan tugas, mengelola tugas, manajemen ilmu pengetahuan/*knowledge management*, dan mampu berperan dalam lingkungan pekerjaan.

Seorang profesional akan mampu bekerja secara profesional dan memiliki kompetensi apabila memiliki ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau non formal.

Pendidikan kepustakawanan yang dulu berupa kursus ahli perpustakaan selama satu tahun, kini telah dibuka minat bidang/program studi/jurusan ilmu perpustakaan sejak diploma sampai doktor di 24 perguruan tinggi negeri/swasta. Sebab kini seorang diakui sebagai pustakawan bukan karena telah lama bekerja di perpustakaan. Kini, seorang boleh mengaku dirinya sebagai pustakawan apabila memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan (Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 8). Dengan demikian, pustakawan harus memenuhi kualifikasi standar nasional perpustakaan yang dalam hal ini yang dimaksud adalah standar tenaga perpustakaan.

Penguasaan ilmu pengetahuan dan pemilikan kompetensi ini menjadi keharusan mengingat pustakawan itu sebagai pengelola perpustakaan yang berfungsi sebagai sumber informasi. Sumber informasi yang dikelolanya diharapkan mampu menjadi sebagai bagian dari masyarakat dunia dan ikut serta membangun masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi World Summit of Information Society – WSIS, 12 Desember 2003.

### **- 4.Upaya Sosialisasi Kepustakawanan**

Pengembangan profesi kepustakawanan dan perpustakaan dipengaruhi oleh usaha para profesional terkait, lembaga pendidikan profesi, organisasi profesi, pemerintah, maupun lembaga tempat bekerja para pustakawan. Usaha-usaha sosialisasi dan promosi yang selama ini telah dilakukan antara lain melalui

seminar, workshop, bedah buku, pelatihan, penerbitan, penyuluhan, dan berbagai lomba bidang kepastakawanan melalui media cetak maupun elektronik.

Sosialisasi ini perlu dilakukan terus menerus dan perlu peningkatan kualitas maupun kuantitasnya. Sebab perkembangan suatu bidang dipengaruhi sejauh mana usaha para profesional yang terkait.

#### - **5. Peran Organisasi Kepustakawanan**

Suatu profesi memerlukan organisasi untuk menampung aspirasi, mengembangkan profesi, menyejahterakan anggota, dan mengawasi kualitas profesionalisme. Melalui organisasi ini, para profesional secara mandiri dapat mengatur pengembangan diri dan profesi mereka. Mereka dapat menentukan arah kebijakan dalam pencapaian prestasi dan karir secara terbuka, bertanggung jawab, dan mengedepankan profesionalisme. Oleh karena itu pustakawan harus mampu berperilaku yang menunjukkan keprofesionalannya yang diterima oleh organisasi profesi dan masyarakat sebagai kliennya.

Seperti halnya organisasi lain, organisasi kepastakawanan tumbuh dari berbagai organisasi lalu menjilma menjadi Ikatan Pustakawan Indonesia/IPI. Kemudian dalam perkembangannya muncul lagi berbagai organisasi kepastakawanan yang bersifat sektarian, jenis, bahkan tingkat intelektual. Hal ini sangat mungkin terjadi karena ketidakmampuan IPI dalam mengadopsi berbagai aspirasi dari mereka yang bekerja di berbagai perpustakaan. Mungkin saja munculnya berbagai organisasi kepastakawanan itu seperti Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia/FPPTI, Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi/FKP2T, Forum Perpustakaan Sekolah Indonesia, Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan Indonesia/ISIPI, Himpunan Pengelola Perpustakaan Sekolah Muhammadiyah/HIMPUSMA memang merupakan kebutuhan untuk eksis dan pengembangan profesi. Hal ini juga terjadi pada organisasi profesi lain di bidang kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia/IDI yang dulu dianggap sebagai satu-satunya organisasi dokter, ternyata kini juga lahir organisasi untuk dokter-dokter anak, gigi, ahli jantung, penyakit kulit, dan lainnya. Perkembangan ini semata-mata untuk mengembangkan spesialis mereka.

Perkembangan organisasi kepastakawanan memang belum seperti perkembangan organisasi profesi lain seperti IDI, IKAHI, PGRI, IKADIN, dan lainnya. Hal ini disebabkan beberap faktor:

##### 1. Sistem keanggotaan tidak ada seleksi

Keanggotaan organisasi kepastakawanan (IPI, FPSI, dll) tidak mensyaratkan pendidikan profesi. Hal ini berbeda dengan profesi seperti IDI, PGRI, IKADIN yang mensyaratkan keanggotaan dengan pendidikan profesional seorang dokter, guru, hakim misalnya.

Tidak adanya persyaratan pendidikan profesi ini justru menyulitkan pembinaan dan pengembangan profesi. Sebab dengan adanya heterogenitas pendidikan itu akan terjadi kesenjangan wawasan, cara berpikir, dan komunikasi para anggota

##### 2. Masih tergantung pada birokrasi

Model kepengurusan kepastakawanan selama bertahun-tahun sangat tergantung pada birokrasi. Hal ini menunjukkan kekurangdewasaan dalam

berorganisasi. Dengan ketergantungan ini menunjukkan kurang adanya rasa percaya diri dan kurang mandiri

### 3. Belum menjadi kebanggaan

Para pengelola perpustakaan belum merasa bangga dan belum menjadi kebutuhan untuk menjadi anggota organisasi profesi. Keterlibatan mereka dalam organisasi profesi seolah-olah karena adanya keterikatan dinas dan kepentingan sesaat (angka kredit, pergaulan, dll.). Kondisi ini mungkin disebabkan bahwa organisasi profesi itu belum/tidak menyentuh langsung kebutuhan para pengelola perpustakaan. Mereka cenderung pasif bahkan apatis terhadap keberadaan organisasi profesi.

## Penutup

Kepustakawanan merupakan ilmu dan/atau profesi di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang keberadaannya memengaruhi bidang lain. Sebab dalam pengembangan bidang dan profesi diperlukan sumber ilmu pengetahuan, dokumentasi, dan informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, maupun karya rekam. Peran ini perlu ditingkatkan terus menerus sebagai pendorong tercapainya masyarakat yang cerdas secara intelektual, sosial, religis, politik, dan ekonomi.

Pengembangan kepustakawanan memiliki banyak peluang antara lain adanya kebijakan pemerintah, berkembangnya lembaga pendidikan kepustakawanan, organisasi profesi, era keterbukaan, dan adanya usaha sosialisasi. Cepat tidaknya pengembangan ini tergantung usaha pustakawan, tim penilai, lembaga pengguna pustakawan, organisasi profesi, lembaga tempat bekerja pustakawan, dan pihak-pihak lain yang terkait.

## Daftar Pustaka

- *Guru dan Karya Tulis Ilmiah*. Kedaulatan Rakyat, 11 Juli 2008
- Kartini. *Kebijakan Pengembangan Pustakawan*. Makalah Rapat Koordinasi Pengembangan Pustakawan dan Tim Penilai di Jakarta tanggal 23 – 24 Juli 2008.
- Lasa Hs., 2006. *Profesi Pustakawan: Harapan dan Tantangan*. Pidato Pengukuhan Sebagai Pustakawan Utama UGM tanggal 6 September 2006
- Nurhadi, Muljani A. 1983. *Sejarah Perpustakaan dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pendit, Putu Laxman.
- *Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi DIY Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Sulistya-Basuki. 1994. *Periodisasi Perpustakaan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- *Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pustakawan dan Angka Kreditnya*
- *Surat Keputusan Menpan No. 132 Tahun 2002 Tentang Pustakawan dan Angka Kreditnya*
- *Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 11 Tahun Tentang Perpustakaan Nasional RI*
- *Surat Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2008 tentang Tunjangan Fungsional*

- *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.* Jakarta: Cemerlang
- *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.*
- *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Sipan Karya Cetak dan Karya Rekam*

## **PARA PENULIS**

### **Ida Fajar Priyanto**

Lulusan Loughborg University ini lahir di Kotagede Yogyakarta. Ia kini sebagai Kepala Perpustakaan UGM dan telah menjelajah seantero dunia untuk menyampaikan makalah, studi banding, maupun kunjungan. Pengelola D 3 Manajemen Informasi & Perpustakaan FISIPOL UGM ini juga mengajar di Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga dan S2 Perpustakaan UGM.

### **Purwono**

Lahir tanggal 14 April 1947 di Klaten, kini bertugas sebagai Penanggungjawab Perpustakaan Fakultas Teknik UGM. Beliau juga aktif sebagai dosen di D3 Manajemen Informasi & Perpustakaan FISIPOL UGM, S2 Perpustakaan UGM, Jurusan Ilmu Perpustakaan & Informasi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pustakawan Utama UGM ini pernah menjadi Ketua IPI DIY. Kini masih dipercaya sebagai Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan UGM, UPN, UII, dan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Disamping itu juga aktif menulis di berbagai media cetak.

### **Purwani Istiana**

Penanggungjawab Perpustakaan Fakultas Geografi UGM ini lahir di Yogyakarta tanggal 23 Juni 1973. Ia pernah terpilih sebagai Pustakawan Teladan II DIY tahun 2007. Kini beliau juga aktif menulis artikel bidang perpustakaan yang dimuat oleh Gagasan, Media Informasi, Berkala Ilmu Perpustakaan & Informasi, Papyrus, Buletin UII, Sangkakala, dan Buletin IPI.. Lulusan S 1 IPI Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga ini juga aktif dalam seminar/workshop bidang perpustakaan dan sebagai Pengurus Forum Pustakawan UGM dan Pengruus IPI DIY.

### **Nurhayati**

Lahir di Blitar 1 Februari 1960. Kini bertugas sebagai Penanggungjawab Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Sejak 1 Mei 1990 sampai tahun 1997 pernah ditugaskan di Perpustakaan Fakultas Kedokteran UGM. Lulusan S2 Perpustakaan UGM ini juga mengajar di D 3 Manajalen Informasi & Perpustakaan Fisipol UGM.

### **Sri Rumani**

Pustakawan Madya UGM kelahiran Sleman ini sekarang ditugasi sebagai Penanggungjawab Perpustakaan FISIPOL UGM. Ia pernah terpilih sebagai Pustakawan Teladan III Tingkat Nasional. Disamping itu ia dipercaya sebagai Ketua Redaksi Berkala Informasi & Perpustakaan dan Media Informasi. Penulis produktif ini juga mengajar di Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### **Heri Abi Burrachman Hakim**

Putra asli Yogya ini lahir 26 September 1982. Kini ia bekerja di Perpustakaan FISIPOL UGM dan aktif menulis. Artikel-artikelnya dimuat oleh Kompas, Media Informasi, Kedaulatan Rakyat, Bernas Yogya, Fihris, dan Buletin UII. Lulusan S1 Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga ini juga aktif dalam seminar/*workshop* bidang perpustakaan.

**Pergola Irianti**

Penanggungjawab Perpustakaan Fakultas Psikologi UGM ini lahir di Yogyakarta 14 Nopember 1958. Ia juga rajin menulis di beberapa publikasi perpustakaan antara lain Media Informasi, Berkala Ilmu Perpustakaan & Informasi, dan Buletin Perpustakaan UII. Profesi pustakawan yang ditekuninya telah mendorongnya untuk maju melalui pendidikan, penulisan, diskusi, maupun penelitian.

**Lasa Hs.**

Pustakawan UGM kelahiran Boyolali ini selama 30 tahun bertugas di Perpustakaan Fakultas Teknologi Pertanian UGM dan sejak Nopember 2006 sebagai Kabid Pelayanan Perpustakaan UGM. Di samping sebagai pustakawan, juga sebagai dosen di D3 Manajemen Informasi & Perpustakaan FISIPOL UGM, S 2 Perpustakaan UGM, D 3 Agroindustri Fakultas Teknologi Pertanian UGM, S 1 Institut Pertanian (INTAN) Yogyakarta, dan Jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia juga sebagai redaksi Berkala Ilmu Perpustakaan & Informasi, Media Informasi, dan Mentari. Sebagai penulis, dari tangannya telah ditulis buku & naskah buku sebanyak 39 judul yang diterbitkan oleh 13 penerbit. Artikel-artikelnya telah dimuat beberapa media cetak.